

Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Muhammad Dzaki Alfarrez¹

e-mail: muhammad.dzaki.2004326@students.um.ac.id

Imam Mukhlis²

e-mail: imam.mukhlis.fe@um.ac.id

(Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, alokasi dana umum serta khusus bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur, serta intensitas keterlibatan angkatan kerja. Fokus studi ini mengacu pada Provinsi Jawa Timur, yang mencakup 38 Kota dan Kabupaten. Pada riset ini digunakan data sekunder. Data ini mencakup pendapatan asli daerah 38 Kota atau Kabupaten di Jawa Timur dari tahun 2018 hingga 2022, alokasi dana umum dan khusus, partisipasi angkatan kerja, serta pertumbuhan ekonomi. Riset ini menerapkan metode analisis regresi data panel untuk mengetahui pengaruh variabel x terhadap variabel y . Berdasarkan temuan studi ini, pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Alokasi dana khusus serta partisipasi angkatan kerja memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap peningkatan atau pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan alokasi dana umum memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan di kota atau kabupaten Jawa Timur melalui pemberdayaan perekonomian lokal dan pembangunan sektor yang potensial.

Kata kunci – Keuangan Daerah, TPAK, Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT: This study aims to examine the impact of local revenue, general and specific fund allocations, and labor force involvement intensity on economic growth in East Java Province. The focus is on East Java Province, covering 38 cities and regencies. This research uses secondary data, including the local revenue of 38 cities or regencies in East Java from 2018 to 2022, general and specific fund allocations, labor force participation, and economic growth. The study applies panel data regression analysis to determine the effect of variable x on variable y . According to the study's findings, local revenue has a positive but insignificant effect on economic growth. Specific fund allocations and labor force participation have a significant negative effect on economic growth in East Java Province. Meanwhile, general fund allocations have a positive effect on economic growth. The findings of this study are expected to be useful in evaluating and formulating policies aimed at sustainably increasing regional income in East Java cities or regencies through the empowerment of the local economy and the development of potential sectors.

Keywords – Regional Finance, TPAK, Economic Growth

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tentunya sangat berdampak pada pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pembangunan ekonomi dianggap sebuah proses tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki hal yang berkaitan dengan ekonomi daerah agar lebih baik lagi. Seolah-olah pembangunan tersebut akan mengizinkan instansi daerah untuk merencanakan keuangan serta menetapkan regulasi untuk mempengaruhi peningkatan mereka (Syafitri & Ariusni, 2019). Pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan bagaimana kegiatan perekonomian suatu wilayah akan menghasilkan peningkatan pendapatan masyarakat, adalah salah satu standar untuk kesuksesan pembangunan ekonomi dalam jangka waktu tertentu (Billah & Wijaya, 2022). Adam Smith menyatakan bahwa proses pertumbuhan terjadi ketika perkeonomian dapat melakukan pembagian kerja, yang akan menghasilkan peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan. Adam juga menekankan pentingnya skala ekonomi karena pasar meluas, inovasi baru dapat muncul yang pada gilirannya meningkatkan pembagian kerja dan ekonomi.

Perumbuhan dan pembangunan ekonomi saling berkorelasi, sehingga indikator keberhasilan pembangunan ekonomi bergantung pada pertumbuhan ekonomi (Djadjuli, 2023). Harrod berpendapat bahwa, karena peran pemerintah dalam pembentukan modal sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, modal yang didapatkan harus digunakan secara efektif. Neo Keyes juga menganggap pertumbuhan ekonomi sebagai kumpulan tindakan yang berasal dari aktivitas ekonomi yang didalamnya termasuk modal dan investasi, yang masing-masing berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Persentase laju pertumbuhan PDRB Jawa Timur pada tahun 2022 sebesar 5,34% dimana angka tersebut naik dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,56%. Dalam 5 tahun terakhir ini PDRB Jawa Timur mencapai angka tertinggi pada tahun 2019, yaitu sebesar 5,53%. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami fluktuasi dan cenderung menurun akibat dari pandemic dari wabah covid 19. Perekonomian Jawa Timur berkontraksi cukup tinggi pada Triwulan II tahun 2020 dibandingkan dengan Triwulan II tahun 2019 sebesar 5,90%. Pandemi covid 19 mempengaruhi pertumbuhan ekonomi semua komponen PDRB, yang menyebabkan pemerintah memberlakukan kegiatan PSBB yang membatasi kemampuan individu dan perusahaan untuk beroperasi, yang mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat dan pemerintah. Hampir semua anggaran APBD dan APBN menggabungkan pengeluaran pemerintah.

Provinsi Jatim merupakan satu diantara wilayah Indonesia yang dihadapkan tantangan merealisasikan KKD. Kemandirian keuangan daerah wilayah Jatim menunjukkan masih belum mencapai tingkat otonomi finansial yang dilansir dari data laporan tinjauan BPK RI. Laporan tersebut mengindikasikan otonomi finansial dalam kurun waktu lima tahun sebesar 20%, angka tersebut masih tergolong rendah. Beberapa wilayah di Jatim berada dalam pola hubungan yang bersifat direktif. Berarti wilayah yang masih ketergantungan pada otoritas pusat, sebabnya peran PAD masih rendah. Data yang terdapat pada situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2018 hingga 2022 Jatim mengindikasikan proporsi perimbangan selalu lebih tinggi dibandingkan peran PAD wilayah di angka 75,71 miliar untuk perimbangan sedangkan rerata peran PAD 39,47 miliar.

Dalam setiap pertumbuhan perekonomian, pemerintah daerah mengupayakan untuk melakukan berbagai jenis pembelanjaan serta pengelolaan. Dengan kata lain, kewajiban utama pemerintah daerah adalah untuk mengumpulkan dana atau penerimaan yang relevan untuk membiayai belanja daerah, pengeluaran modal, atau pengeluaran pembangunan (Ananda et al., 2017). Hal tersebut sesuai dengan perundangan-undangan 22 Tahun 1999, yang memperincikan mengenai otonomi daerah serta desentralisasi fiskal.

Otonomi daerah merupakan upaya untuk memberikan wewenang kepada daerah untuk membuat kebijakan dan mengatur kekayaan yang sesuai dengan prioritas dan potensi daerah. Serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut, otonomi daerah dapat diberlakukan.

Salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi daerah adalah PDRB, yang bisa menggambarkan seberapa besar aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Hal ini adalah indikator pertumbuhan ekonomi yang paling umum, tetapi bukan satu-satunya indikator pertumbuhan ekonomi domestik.

PAD serta pendapatan lain yang sah adalah sumber pendanaan pemerintah daerah, berdasarkan Peraturan Nomor 32 Tahun 2004. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut alokasi dana umum, alokasi dana khusus, dana bagi hasil yang diperoleh dari pungutan atau sumber pendapatan lain akan dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk dana perimbangan melalui APBN. Melalui pajak yang dibagihasilkan, dana bagi hasil juga membantu menyeimbangkan finansial otoritas pusat dengan wilayah. Di Indonesia, alokasi dana umum berfungsi untuk memberikan penyalarsan keuangan antar wilayah. Alokasi dana khusus diberikan sebagai keuangan yang bersifat darurat. Diluar ketiga fungsi tersebut digunakan sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten atau kota yang bersangkutan diharapkan untuk menggunakan alokasi dana ini secara efisien untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pemerintah juga akan menanggung atas pengelolaan keuangan tersebut (Nurul Arbila et al., 2022). Dari latar belakang permasalahan yang dijelaskan, peneliti terdorong melakukan riset yang bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, alokasi dana umum serta khusus bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur, serta intensitas keterlibatan angkatan kerja.

TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan ekonomi dialami saat kuantitas komoditas serta pelayanan yang diproduksi oleh masyarakat setempat meningkat sebagai akibat dari pertumbuhan kegiatan ekonominya (Putri, 2016). Pertumbuhan ekonomi juga berarti perbaikan kondisi ekonomi sebuah negara atau wilayah dalam periode waktu yang ditentukan (Yasin, 2020). Untuk melakukan sebuah ukuran yang dipergunakan untuk menilai perekonomian suatu daerah atau negara ialah pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas dari suatu wilayah pada masa yang lebih lama untuk menyediakan berbagai produk ekonomi kepada masyarakatnya. Sebuah faktor yang dipakai untuk menentukan ialah PDRB serta GDP yang diperoleh oleh negara tersebut untuk mengukur pertumbuhan ekonomi (Hafandi & Romandhon, 2020)

Menurut ekonom klasik, beberapa faktor memengaruhi perkembangan ekonomi tergantung pada besar penduduk, besar modal, luas tanah, serta SDA. Demikian juga memperhatikan pengaruh penambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Penurunan hasil tambahan juga akan berdampak pada tingkat perkembangan ekonomi suatu negara, sehingga perkembangan terhambat berlanjut (Astuti, 2018). Investasi yang telah dibuat akan menghasilkan pengembalian modal yang tinggi jika penduduknya sedikit dan kekayaan alamnya banyak. Pengusaha akan memperoleh tingkat keuntungan yang besar dan berdampak memajukan pengusaha lain agar melakukan investasi baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Syahputra, 2017).

Pendapatan Asli Daerah

Penghasilan yang dihasilkan bersumber dari pungutan wilayah sejalan dengan regulasi yang berlaku disebut PAD. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan sebagai bagian dari desentralisasi, untuk memberi daerah kemampuan untuk menggali pendanaan untuk melaksanakan ekonomi daerah (Billah & Wijaya, 2022). Dijelaskan dalam UU Nomor 3 Pasal 1 Tahun 2004, PAD adalah penghasilan bersumber atau diterima oleh wilayah atau wilayah dari berbagai sumber di daerahnya yang diambil sejalan dengan Perda yang berlaku (Lutpikah & Mahendra, 2020). PAD disebut dengan segala pendapatan wilayah yang diperoleh oleh daerah bersumber dari aktivitas ekonomi lokal. PAD juga dikatakan sebagai sumber utama suatu wilayah atau daerah dan sepenuhnya untuk pembangunan daerah serta hasilnya dipergunakan oleh semua orang (Sembiring, 2019).

Alokasi Dana Umum

Satu cara pemerintah memberikan dana kepada pemerintah daerah adalah melalui DAU atau lembaga lain, berasal dari pendapatan APBN. DAU adalah "Grant Blok", yang berarti dananya diberikan untuk wilayah sejalan dalam kaitannya dengan prioritas dan kebutuhan. peningkatan wilayah (Paat et al., 2019). Alokasi dana umum juga dapat diartikan dana tahunan disediakan otoritas pusat untuk pembangunan dan pemerataan antar daerah sebagai proses desentralisasi (Williantara & Budiasih, 2016). Dalam konteks mengimbangi desentralisasi dan otonomi daerah, bantuan otoritas pusat melalui alokasi dana umum serta khusus dan DBH terus menjadi penghasilan utama (Sembiring, 2019).

Alokasi Dana Khusus

Alokasi dana khusus disebut dengan biaya yang disediakan oleh otoritas pusat yang berasal dari APBN agar memenuhi keperluan regional tertentu (Sembiring, 2019). Alokasi dana khusus, sesuai UU Tahun 2004 No 33 membahas Pengaturan finansial pusat dengan daerah, adalah bagian dari biaya perimbangan, alokasi dana khusus ditujukan untuk wilayah atau regional untuk mendukung inisiatif atau pekerjaan khusus yang sesuai dengan prioritas nasional (Williantara & Budiasih, 2016). Karena alokasi dana khusus termasuk dalam APBN pemerintah daerah memiliki kendali penuh atas penggunaan DAK (Widyasari, 2013).

Perda Tahun 2005 No 55 menetapkan bahwa daerah harus memenuhi persyaratan teknis, umum, dan khusus, terlebih dahulu sebelum dapat menerima bantuan alokasi dana khusus. Kategori ini harus selaras dengan kemampuan keuangan wilayah dan menjadikan APBD sebagai tolak ukur (Nurul Arbila et al., 2022). Kriteria khusus berasal dari kebijakan yang mengatur otonomi khusus dan karakteristik wilayah tersebut. Di sisi lain, kriteria teknis yang disusun oleh menteri teknis yang relevan dan berfungsi sebagai tolak ukur untuk kegiatan prioritas yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (Ginting et al., 2023).

Partisipasi Angkatan Kerja

Partisipasi angkatan kerja ialah rasio pekerjaan terhadap usia kerja. Menurut (Badan Pusat Statistik, 2023) sebuah ukuran yang paling umum untuk mengukur perubahan dalam TPAK mengukur partisipasi penduduk yang berusia dalam rentang usia kerja. dalam aktivitas ekonomi di wilayah tersebut (Sari & Susanti, 2018). Angkatan Kerja (AK) dan Populasi Usia Kerja (PUK) adalah dua acuan yang dipergunakan menentukan persentase angkatan kerja (Syamsuddin et al., 2021).

Partisipasi angkatan kerja juga bisa dijelaskan sebagai perbandingan antara jumlah populasi yang aktif dalam kegiatan ekonomi, yang juga dikenal sebagai pekerja aktif terhadap seluruh populasi dalam rentang usia yang dapat bekerja. Tenaga kerja bisa juga diartikan sebagai jumlah perorangan sedang kerja atau dalam mendapatkan pekerjaan (Mirah et al., 2020). Dalam partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan dari jumlah penduduk berusia 16 hingga 30 tahun yang terlibat dalam aktivitas ekonomi (Putri, 2016). Pada dasarnya, partisipasi angkatan kerja mengindikasikan seberapa banyak masyarakat aktif dalam tenaga kerja, baik mereka bekerja atau tidak, serta seberapa jauh jaraknya dari penduduk dalam usia kerja aktif (Yuniarti et al., 2020).

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak pendapatan asli daerah, alokasi dana umum serta khusus, dan partisipasi angkatan kerja bagi pertumbuhan ekonomi di beberapa kota serta kabupaten Provinsi Jawa Timur.

METODE

Peneliti menerapkan pendekatan kuantitatif dalam studi ini, penerapan dilandaskan filosofi positivisme dan diterapkan dalam menyelidiki sampel tertentu (Suryani, 2016). Analisis statistik dilakukan selama pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Tujuannya adalah untuk menguji hipotesis yang telah diformulasikan (Sugiyono, 2016).

Studi ini mencakup seluruh Kota serta Kabupaten wilayah Jawa Timur melibatkan seluruh populasi, yaitu 38 Kota atau Kabupaten. Kami menggunakan data sekunder dalam bentuk seri waktu dari tahun 2018-2022 serta cross section yang meliputi 38 kota/kabupaten wilayah Jawa Timur. Data didapatkan tidak langsung yang bersumber melalui berbagai sumber dimana dapat diandalkan, seperti laporan, jurnal, situs web, artikel, dan sumber lainnya. Sumber data utama termasuk Laporan Realisasi APBD dan APBN dari 38 Kota dan Kabupaten, serta situs web BPS serta Kementerian Keuangan.

Penelitian ini mempergunakan lima variabel, di mana pertumbuhan ekonomi adalah variabel dependen; sementara pendapatan asli daerah. Alokasi dana umum, alokasi dana khusus, serta partisipasi angkatan kerja adalah variabel independen. Teknik analisis yang diterapkan ialah menggunakan regresi data panel yang dimana melakukan observasi berulang pada suatu objek pada titik waktu yang berbeda, analisis regresi data panel merupakan perkembangan dari teknik analisis regresi linier berganda, berfungsi untuk mengidentifikasi elemen yang signifikan. Data panel terbentuk dari gabungan data rentang waktu yang berkesinambungan deret waktu serta data melalui berbagai entitas pada periode tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Estimasi Model

Uji Chow

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Sumber tabel: Data diolah peneliti, 2024

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.671977	(37.146)	0.9207
Cross-section Chi-square	29.564194	37	0.8207

Karena nilai Prob. Chi-Square mencapai 0.8027, yang lebih tinggi dari angka probabilitas 0.8027 ($\alpha = 0,05$), hasil perhitungan uji Chow menunjukkan bahwasanya CEM dapat dipilih berbanding dengan FEM.

Uji Hausman

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Sumber tabel: Data diolah peneliti, 2024

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob.
Cross-section random	5.258428	4	0.2618

Menurut perhitungan Hausman Test, dengan Probabilitas 0.2618, ditarik kesimpulannya bahwa REM jauh efisien dibandingkan dengan FEM ketika nilai 0.2618 melebihi nilai α ($\alpha = 0,05$).

Uji Lagrange Multiplier

Tabel 3. Hasil Uji Lagrange Multiplier
Sumber tabel: Data diolah peneliti, 2024

Null (no rand. Effect) Alternative	Cross- section	Period	Both
	One-sided	One-sided	
Breusch-Pagan	2.262106 (0.1326)	368.2578 (0.0000)	370.5199 (0.0000)

Dengan nilai Breusch-Pagan senilai 0.1326, lebih tinggi dibandingkan dengan nilai α ($\alpha = 0,05$), hasil uji Lagrange Multiplier (LM) dalam tabel menunjukkan bahwa model Common Effect Model (CEM) adalah pilihan yang optimal.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Dari hasil pengujian multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai dari antar variabel dibawah nilai 0.85. Pengujian multikolinearitas ini didasarkan pada nilai 0.85 yang mengindikasikan bahwa setiap variabel independen dianggap lolos uji multikolinearitas jika nilainya berada di bawah 0.85. Dengan demikian, setiap variabel independen dianggap berhasil lolos uji multikolinearitas karena nilainya berada di bawah 0.85. Dari hasil uji heteroskedastisitas, yang berkisar antara 15 dan -15. Nilai-nilai ini tetap berada di antara 500 dan 500, yang menunjukkan bahwa data dalam penelitian tidak menunjukkan heteroskedastisitas.

Hipotesis

Uji T

Tabel 5. Hasil Uji T
Sumber tabel: Data diolah peneliti, 2024

Variable	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-325.7364	37.44290	-8.699549	0.0000
Pendapatan Asli Daerah	0.000124	0.000257	0.482033	0.6304
Alokasi Dana Umum	3.449879	0.370604	9.308807	0.0000
Alokasi Dana Khusus	-0.075925	0.027605	-2.750370	0.0066
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-0.116569	0.057734	-2.019078	0.0449

Hasil analisis mengindikasikan alokasi dana umum berdampak positif signifikan dengan nilai probabilitas senilai 0.0000 lebih rendah α ($\alpha = 0,05$). Di samping demikian alokasi dana khusus juga berdampak negatif signifikan, seperti yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi atau senilai 0.0066 lebih kecil ($\alpha = 0,05$). Temuan dari riset mengindikasikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga memiliki dampak negatif signifikan oleh tingkat probabilitas 0.0449 ($\alpha = 0,05$). Namun, PAD tidak berdampak positif, oleh tingkat probabilitas senilai 0.6304 ($\alpha = 0,05$).

Uji F

Tabel 6. Hasil Uji F
Sumber tabel: Data diolah peneliti, 2024

F-Statistic	27.67986
Prob (F-statistic)	0.000000

Didapatkan Prob F statistik senilai 0.0000, sesuai dengan hasil uji F diatas, H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian mengindikasikan variabel pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, alokasi dana umum, alokasi danakhusus, dan tingkat partisipasi angkatan kerja.

Uji R Squared

Tabel 7. Hasil Uji R Squared
Sumber tabel: Data diolah peneliti, 2024

R-squared	0.376956
Adjusted R-squared	0.363338

Berdasarkan tabel hasil penelitian menunjukkan bahwa *adjusted R-Squared* yaitu 0.363338. Hal ini bermakna bahwasanya variabel Pendapatan Asli Daerah Alokasi Dana Umum, Alokasi Dana Khusus, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja memiliki kontribusi sebesar 36.33% pada variabel terikat, sementara selebihnya 63.67 dijabarkan oleh variabel lainnya yang tidak dicantumkan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Analisis mengindikasikan bahwa PAD (X1) memiliki dampak signifikan positif tetapi tidak bagi Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Kota atau Kabupaten Jawa Timur. Temuan ini diperkuat oleh koefisien sebesar 0,000124 dan nilai probabilitas senilai $0,6304 > (\alpha = 0,05)$. Ini bersesuaian dengan hasil penelitian sebelumnya oleh (Haris Mutasim Billah, 2022), yang menyimpulkan pertumbuhan ekonomi tidak begitu dipengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Faktanya, ini disebabkan oleh kendala dalam pemanfaatan potensi pajak serta pungutan daerah serta penghasilan daerah lainnya, yang belum dimaksimalkan atas tindakan pemerintah daerah. Ini karena ada banyak indikator pendapatan asli daerah, seperti tempat wisata dan perekonomian lokal, dan pemerintah seharusnya meningkatkan perekonomian di sektor wisata selain mengembangkan sektor lain yang mungkin menghasilkan lebih banyak pendapatan asli daerah. Analisis mengindikasikan bahwa PAD memiliki dampak signifikan positif tetapi tidak bagi Pertumbuhan Ekonomi di Kota atau Kabupaten Jawa Timur. Menurut (Ismanudin, 2011) suatu wilayah atau daerah harus mempunyai kemampuan dalam menggali sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan secara efisien yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari hasil analisis bersesuaian dengan hasil penelitian sebelumnya oleh (Billah & Wijaya, 2022) yang menyimpulkan pertumbuhan ekonomi tidak begitu dipengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Hal ini disebabkan oleh kendala dalam pemanfaatan potensi pajak serta pungutan daerah serta penghasilan daerah lainnya, yang belum dimaksimalkan atas tindakan pemerintah daerah. Dikarenakan ada banyak indikator pendapatan asli daerah, seperti tempat wisata dan perekonomian lokal yang kurang digali, dan pemerintah seharusnya memberikan kebijakan berupa peningkatan perekonomian di sektor wisata selain mengembangkan sektor lain yang mungkin menghasilkan lebih banyak pendapatan asli daerah.

Temuan analisis menunjukkan alokasi dana umum (X2) memiliki dampak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Y) secara positif signifikan terhadap kota/kabupaten di Jawa Timur. Faktor ini terjawab dari hasil pengujian penelitian, dengan rasio senilai 3,499879 dan nilai probabilitasnya $0,0000 < (\alpha = 0,05)$. Penelitian sebelumnya oleh (Rihfenti Ernayani, 2017) juga menegaskan alokasi dana umum berdampak positif signifikan bagi belanja wilayah. Temuan sejalan dengan temuan sebelumnya, di mana belanja wilayah mempengaruhi secara positif signifikan bagi peningkatan perembangan ekonomi suatu wilayah., dan peningkatan tingkat penduduk bekerja dan perkembangan ekonomi yang besar akan berdampak signifikan dalam meminimalkan angka kemiskinan di daerah tersebut. Makin besar alokasi umum itu ditetapkan otoritas pusat melalui APBN, maka dari itu tingkat belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi di

wilayah tersebut akan meningkat. Temuan analisis menunjukkan alokasi dana umum memiliki dampak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif signifikan terhadap kota/kabupaten di Jawa Timur. Menurut (Astria, 2014) pengalokasian dana umum diberikan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah serta membantu dalam menggali potensi ekonomi daerah berupa menyubsidi beberapa kegiatan yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam hasil analisis ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh (Ernayani, 2017) juga menegaskan alokasi dana umum berdampak positif signifikan bagi belanja wilayah. Temuan sejalan dengan temuan sebelumnya, di mana belanja wilayah mempengaruhi secara positif signifikan bagi peningkatan perembangan ekonomi suatu wilayah, dan peningkatan tingkat penduduk bekerja dan perkembangan ekonomi yang besar akan berdampak signifikan dalam meminimalkan angka kemiskinan di daerah tersebut. Makin besar alokasi umum itu ditetapkan otoritas pusat melalui APBN, maka dari itu tingkat belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut akan meningkat.

Temuan dari riset mengindikasikan alokasi dana khusus (X3) berdampak negatif signifikan bagi pertumbuhan ekonomi (Y) di kota/kabupaten di Jatim. Analisis data menunjukkan t -statistik $-0,075925$ serta nilai Prob. $0,0066 < (\alpha = 0,05)$. (Nursita Wulandari, 2020) melakukan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa alokasi dana khusus berdampak negative signifikan bagi ekonomi kota/kabupaten. Sementara itu, alokasi umum bersumber APBN memiliki kemiripan bersama dana alokasi khusus, namun alokasi umum diberikan bagi wilayah prioritas. Dipergunakan mendukung suatu aktivitas tertentu. Dengan memberikan dana khusus kepada daerah yang membutuhkan, belanja modal dapat meningkat, yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan alokasi dana khusus berdampak negatif signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di kota/kabupaten di Jatim. Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 alokasi dana khusus merupakan alokasi yang diberikan oleh otoritas pusat dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan ekonomi yang bersifat prioritas. Hasil analisis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sembiring, 2019) yang menemukan bahwa alokasi dana khusus berdampak negative signifikan bagi ekonomi kota/kabupaten. Sementara itu, alokasi umum bersumber APBN memiliki kemiripan bersama dana alokasi khusus, namun alokasi umum diberikan bagi wilayah prioritas. Dipergunakan mendukung suatu aktivitas tertentu. Dengan memberikan dana khusus kepada daerah yang membutuhkan, belanja modal dapat meningkat, yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi

Hasil analisis mengindikasikan bahwa TPAK berdampak negatif signifikan bagi Ekonomi di Kota/Kabupaten Jatim. Riset pengujian Koefisien bernilai $-0,116569$ dan probabilitasnya $0,0449 < (\alpha = 0,05)$. Temuan ini konsisten bersama penelitian yang dilakukan oleh (Trie Hierdawati, 2022) yang menunjukkan TPAK berdampak negatif signifikan bagi pertumbuhan ekonomi suatu kota atau kabupaten. Hasil analisis mengindikasikan bahwa partisipasi angkatan kerja berdampak negatif signifikan bagi Ekonomi di Kota/Kabupaten Jawa Timur. Menurut (Rosyetti, 2009) penduduk suatu wilayah yang terus bertambah akan berpotensi memperbesar jumlah tenaga kerja dan disisi lain otoritas terkait akan menambah jumlah produksi yang diakibatkan pendidikan, pengalaman kerja, dan kemahiran penduduk akan selalu bertambah tinggi, maka produktivitas akan bertambah dan mendorong pertambahan jumlah produksi dari kegiatan atau aktivitas ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hierdawati, 2022) yang menunjukkan partisipasi angkatan kerja berdampak negatif signifikan bagi pertumbuhan ekonomi suatu kota atau kabupaten. Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan indikator keberhasilan operasi ekonomi di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, pemerintah pusat harus membuat kebijakan yang kuat untuk angkatan kerja, termasuk berbagai inisiatif untuk mendorong pemberdayaan tenaga

kerja, fasilitas yang layak untuk pekerja, lebih banyak pelatihan khusus untuk pekerja, dan lebih banyak perhatian untuk kenaikan upah atau gaji sesuai dengan kinerja pekerja. Untuk meningkatkan keterlibatan semua gender untuk angkatan kerja, pemerintah juga perlu meningkatkan pembukaan lapangan kerja.

KESIMPULAN

Studi ini mencatat bahwa kenaikan PAD memiliki berdampak positif tidak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Alokasi dana umum menghasilkan efek signifikan positif bagi perkembangan ekonomi Alokasi dana khusus memberikan efek negative signifikan bagi perkembangan ekonomi; dan TPAK memberikan dampak negatif signifikan bagi pertumbuhan ekonomi kota atau kabupaten. Dari hasil penelitian juga dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh Kota atau Kabupaten di Provinsi Jawa Timur masih cenderung mengandalkan transfer daerah untuk berbagai pembelanjaan. Untuk menunjukkan peningkatan pendapatan asli daerah, ada sejumlah indikator yang berbeda, termasuk retibusi pungutan pajak, pajak lokal, dan penghasilan wilayah sah lainnya. Peningkatan satu unsur ini secara tidak langsung menunjukkan peningkatan pendapatan daerah, yang Akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penyediaan alokasi umum dan khusus tinggi juga potensi meningkatkan investasi modal dalam daerah tersebut. Investasi modal ini tentunya sangat berdampak bagi perkembangan ekonomi karena akan memberikan dampak positif untuk kegiatan perekonomian di daerah tersebut, seperti pembangunan sektor yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta memberikan kesempatan bagi para pekerja untuk bekerja. Studi ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan di kota atau kabupaten Jawa Timur melalui pemberdayaan perekonomian lokal dan pembangunan sektor yang potensial. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan berbagai variabel yang berbeda serta menggunakan data primer dan sekunder, dan menggunakan data terbaru dan akurat untuk bahan penelitian. Diharapkan juga peneliti akan menambahkan variabel lain yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, D., Putra, A., Mukhlis, I., & Utomo, S. H. (2017). Analisis Pengaruh Foreign Direct Investment, Nilai Tukar, Dan Government Expenditure Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan*, 1997, 294–303.
- Astria, S. A. (2014). ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA SELATAN. *JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN*, 12(1), 42–54.
- Astuti, P. W. (2018). Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada 33 Provinsi di Indonesia). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2), 11.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2021-2023*. Badan Pusat Statistik Jawa Timur. <https://jatim.bps.go.id/indicator/6/277/1/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-tpak-.html>
- Billah, H. M., & Wijaya, R. S. (2022). Pengaruh PAD, DAU, Inflasi, dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8), 2437–2447.
- Djadjuli, D. (2023). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 10(3), 8–21.
- Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). *JSHP (Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan)*, 1(1), 43. <https://doi.org/10.32487/jshp.v1i1.234>

- Ginting et al. (2023). Pengaruh Green Marketing , Inovasi Produk dan Brand Awareness Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus : PT Unilever Indonesia Tbk). *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(4), 986–992.
- Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 182–191. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337>
- Hierdawati, T. (2022). Pengaruh TPAK, Kesehatan dan Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 1(8), 958–966.
- Ismanudin. (2011). Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Kemandirian Daerah Kabupaten Indramayu. *ASPIRASI FISIP UNWIR INDRAMAYU*, 1–7.
- Lutpikah, N. W., & Mahendra, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Karanganyar Tahun 2017-2019. *AKTUAL : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 147–158.
- Mirah, M. R., Kindangen, P., & Rorong, I. P. F. (2020). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. *Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21(1), 85–100.
- Nurul Arbila, Yani Rizal, & Iskandar Iskandar. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Labuhan Batu. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(4), 240–249. <https://doi.org/10.55606/optimal.v2i4.741>
- Paat, D. C., Koleangan, R. A. M., & Rumat, V. A. (2019). Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Di Kota Bitung. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado ABSTRAK*, 1–10.
- Putri, Z. E. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Esensi*, 5(2), 173–186. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2340>
- Rosyetti. (2009). Studi Keterkaitan Pertumbuhan Penduduk Dengan Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Ekonomi*, 17.
- Sari, C., & Susanti, P. (2018). Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Lhokseumawe. *Ekonomika Indonesia*, VII(2), 33–44.
- Sembiring, E. A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Utara. *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition Journal)*, 1(2), 160–170.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta. In Sutopo (Ed.), *Bandung: Alfabeta*. (2nd ed., Vol. 3, Issue April). ALFABETA.
- Suryani, H. (2016). *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Bisnis*. Kencana.
- Syafitri, A., & Ariusni, A. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(2), 351. <https://doi.org/10.24036/jkep.v1i2.6177>
- Syahputra, R. (2017). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(2), 183.
- Syamsuddin, N., Nelly, Rahmi, Hadi Saputra, D., Mulyono, S., Muhammad, Fuadi, Z., & Anwar. (2021). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh. *Jurnal Sociohumaniora Kodepena (JSK)*, 2(1), 29–49. <https://doi.org/10.54423/jsk.v2i1.61>

- Widyasari, N. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1–16.
- Williantara, G. F., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(3), 2044-2070–2070.
- Yasin, M. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 3(2), 465–472. <https://doi.org/10.31539/costing.v3i2.1161>
- Yuniarti, P., Wianti, W., & Nurgaheni, N. E. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(3), 169–176. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i3.207>